

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah. dkk. 2012. *Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan di Indonesia*. Pustaka Larasan. Denpasar.
- Ali, H. Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asikin, Zainal dkk. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asyhadie, Zaebu. 2008. *Hukum Kerja*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djumaldji, F.X. dan Wiwoho Soejono. 2001. *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*. PT Bina Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Unram Press. Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2009. *Legal Officer*. Visi Media. Jakarta.
- _____. 2016. *Bacaan Wajib Setiap Karyawan : Hak dan Kewajiban Pekerja*. Visi Media. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. UI Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- _____. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soepomo, Imam. 2001. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Djambatan. Jakarta.
- Ugo & Pujiyo. 2012. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*. PT Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

- Andi Yuliani, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 04, 2017.
- Fitriana Gunadi, “Upah Proses Dalam Pemutusan Hubungan Kerja”, *Jurnal Hukum & Pengembangan*, Volume 50, Nomor 4, 2020.
- Refly R. Umbas, “Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Karyawan Dengan Perusahaan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II, No.3, Ags-Okt 2014.
- Yetniwati, *Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Berkeadilan*, “*Mimbar Hukum*”, Vol. 29, No. 1, 2017.

Tesis

- Evi Yulindari, 2018, “Analisis Yuridis Mengenai Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Pada Putusan Perkara Nomor: 15/PDT.SUS-PHI/2014/PN.GS di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Gresik)” *Tesis*, Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada.Z
- Febrianto, 2014, “Dampak Proses Penuntutan Pembayaran Upah Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-X/2012””, *Tesis*, Pascasarjana, Fakultas Hukum, Univeristas Gadjah Mada.
- Sultan Fauzan Hanif, 2020, “Kepastian Hak Atas Upah Proses Pekerja Yang Berstatus Perjanjian Kerjanya Demi Hukum Telah Beralih Dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu”, *Tesis*, Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada.

Internet

- Mahkamah Konstitusi RI Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, 25 November 2021, “MK : Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, dikutip dari : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>, diakses pada tanggal 8 Juni 2023, Pukul 15.00 WIB.
- Muhammad Teguh Pangestu, 17 Juni 2020, “Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian dan Implikasi Terhadap Perjanjian”, dikutip dari : <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/#:~:text=Dari%20Keputusan%20Presiden%20Nomor%2012,dapat%20dinyatakan%20sebagai%20force%20majeure.%20Diakses%20pada%20kami%20pukul%202020.06%20WIB>, diakses pada Kamis, 3 Maret 2022, Pukul 20.06 WIB.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

Peraturan Menteri Nomor Per-03/Men/1996 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta.

Keputusan Menteri Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Keputusan Menteri Nomor Kep-78/Men/2001 tentang Perubahan atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Kep-150/Men/2000.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 3 Tahun 2015).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 3 Tahun 2018).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Surat Edaran Menakertrans No. SE-643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja.

Putusan

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk Perihal Perselisihan Hubungan Industrial perkara Donni Candra Ferdy dkk. melawan PT. Anugerah Mulia Sentosa, 03 Maret 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Perihal Perselisihan Hubungan Industrial perkara Donni Candra Ferdy dkk. melawan PT. Anugerah Mulia Sentosa, 15 Juni 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 September 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 I/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 November 2021.

Lain-lain

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Tangkas Ukur Purba Kuasa Hukum PT Anugerah Mulia Sentosa (Chocolate Monggo) di Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Kurniawan selaku Anggota dari Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) di Yogyakarta pada tanggal 20 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ibu Niken selaku Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta di Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 11.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak P. Cokro Hendro Murti selaku Hakim Ketua pada Perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Yyk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 15 Juni 2022, Pukul 12.00 WIB.